

Politik Produksi Ruang Pesisir

(Studi Kasus Komersialisasi Kawasan Mawatu di Labuan Bajo dalam Perspektif Henri Lefebvre)

Maksimilianus Saksono^{1*}, Yohanes Fisher Keon², Stefanus Triadmaja³,
Diana S. A. Tabun⁴

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Penulis Korespondensi: lianmaksilianus@gmail.com

Abstract. *The commercialization of coastal space in the Mawatu Area, formerly known as Sala Hana Beach, is part of the expansion of tourism investment in Labuan Bajo. This transformation has changed not only the physical landscape but also patterns of spatial use, community access, relations between government and local communities, and the meaning attached to coastal space. This study aims to analyze the politics of coastal space production in the commercialization of the Mawatu Area through government-community relations using Henri Lefebvre's Production of Space perspective. The study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews with nine informants representing local government, village government, coastal communities, traditional leaders, MSME actors, and state institutions, as well as documentation. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that space production operates through Lefebvre's three dimensions. Spatial practice indicates a shift from use value toward exchange value, affecting fishermen's activities and local economic access. Representations of space reveal the dominant role of spatial planning policies and tourism-development agendas in legitimizing changes in coastal land use. Representational space reveals a contestation of meanings between coastal space as a lived space and space oriented toward investment. Thus, Mawatu's commercialization is a socio-political process that reshapes the function, access, power relations, and meaning of coastal space.*

Keywords: Coastal Commercialization; Henri Lefebvre; Mawatu Area; Politics of Space; Production of Space.

Abstrak. Komersialisasi ruang pesisir di Kawasan Mawatu, yang sebelumnya dikenal sebagai Pantai Sala Hana, merupakan bagian dari perkembangan investasi dan pariwisata di Labuan Bajo. Perubahan tersebut tidak semata-mata mengubah kondisi fisik kawasan, tetapi juga menggeser pola pemanfaatan ruang, akses masyarakat, relasi antara pemerintah dan masyarakat, serta pemaknaan ruang pesisir. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik produksi ruang pesisir dalam proses komersialisasi Kawasan Mawatu berdasarkan relasi pemerintah dan masyarakat dengan menggunakan perspektif Teori Produksi Ruang Henri Lefebvre. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam terhadap sembilan informan yang berasal dari unsur pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat pesisir, tokoh adat, pelaku UMKM, dan lembaga negara, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi ruang berlangsung melalui tiga dimensi Lefebvre. Praktik spasial memperlihatkan pergeseran nilai guna menuju nilai tukar yang berdampak pada perubahan aktivitas nelayan dan akses ekonomi masyarakat. Representasi ruang menunjukkan dominasi kebijakan tata ruang dan agenda pembangunan pariwisata dalam melegitimasi perubahan fungsi kawasan. Ruang representasional menunjukkan kontestasi makna antara ruang hidup masyarakat dan ruang yang berorientasi pada investasi. Dengan demikian, komersialisasi Mawatu merupakan proses sosial-politik yang membentuk kembali fungsi, akses, relasi kuasa, dan makna ruang pesisir.

Kata Kunci: Henri Lefebvre; Kawasan Mawatu; Komersialisasi Pesisir; Politik Ruang; Produksi Ruang.

1. PENDAHULUAN

Ruang pesisir merupakan wilayah yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan ekologis bagi masyarakat. Bagi komunitas nelayan, pesisir tidak hanya menjadi lokasi kegiatan ekonomi, tetapi juga ruang interaksi sosial dan bagian dari identitas kehidupan sehari-hari. Namun, peningkatan investasi pariwisata dan properti mendorong perubahan fungsi ruang pesisir

menjadi ruang wisata dan komersial. Perubahan tersebut dapat menggeser pemanfaatan ruang yang sebelumnya bersifat kolektif menuju ruang yang lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi dan investasi (Kamim, 2022; Sanjiwani, 2023).

Fenomena tersebut terlihat pada perkembangan Kawasan Mawatu di Labuan Bajo. Sebelum dikembangkan, kawasan yang dikenal masyarakat sebagai Pantai Sala Hana dimanfaatkan untuk menangkap ikan, bersandar perahu, rekreasi, dan interaksi sosial. Dalam perkembangannya, kawasan tersebut diarahkan menjadi kawasan wisata terpadu yang menggabungkan fungsi pariwisata, perdagangan, hiburan, dan ruang publik. Skripsi yang menjadi sumber artikel ini mencatat bahwa kawasan yang dikembangkan mencapai sekitar 12 hingga 12,8 hektare dan mencakup berbagai fasilitas wisata. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pesisir mengalami transformasi dari ruang dengan nilai guna bagi masyarakat menuju ruang yang semakin memiliki nilai ekonomi dan nilai tukar (Widiana et al., 2026;).

Perubahan ruang tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai pembangunan fisik. Perubahan juga menyangkut siapa yang mempunyai kewenangan menentukan fungsi ruang, bagaimana kebijakan tata ruang digunakan, bagaimana investasi mengarahkan pemanfaatan kawasan, serta bagaimana masyarakat merespons perubahan tersebut. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki kewenangan melalui perencanaan dan regulasi, pihak pengembang mempunyai sumber daya modal untuk mengembangkan kawasan, sedangkan masyarakat merupakan pihak yang mengalami perubahan akses dan fungsi ruang secara langsung (Waskito et al., 2025).

Teori Produksi Ruang Henri Lefebvre digunakan untuk memahami proses tersebut. Lefebvre (1991) memandang ruang sebagai produk sosial yang dibentuk oleh praktik, representasi, dan pengalaman hidup. Tiga dimensi tersebut terdiri atas praktik spasial (*spatial practice*), representasi ruang (*representations of space*), dan ruang representasional (*representational space*). Perspektif ini memungkinkan perubahan kawasan Mawatu dianalisis bukan hanya dari bentuk fisiknya, tetapi dari proses sosial-politik yang membentuk ruang tersebut.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perubahan ruang wisata dapat memengaruhi akses dan kehidupan masyarakat lokal. Nuraini dkk. (2025) menunjukkan bahwa perubahan ruang publik akibat revitalisasi kawasan wisata dapat memunculkan eksklusi sosial. Sujadmi dan Murtasidin (2020) memperlihatkan bahwa perencanaan ruang laut dapat menjadi arena konflik, negosiasi, dan kontestasi kepentingan antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat nelayan. Ibrahim dkk. (2023) menemukan bahwa komersialisasi ruang publik tepi laut dapat mengurangi fungsi sosial dan membatasi akses masyarakat. Sementara itu, Kiwang

dan Arif (2020) menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata di Labuan Bajo membawa peluang ekonomi sekaligus perubahan mata pencaharian, akses nelayan, dan kepemilikan lahan.

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini menempatkan Kawasan Mawatu sebagai arena politik produksi ruang. Fokusnya bukan hanya pada dampak pariwisata, tetapi pada bagaimana ruang pesisir diproduksi melalui hubungan antara kebijakan pemerintah, investasi, praktik pemanfaatan ruang, dan pemaknaan masyarakat. Dengan demikian, artikel ini mengisi ruang kajian yang secara khusus menghubungkan proses komersialisasi Kawasan Mawatu dengan tiga dimensi produksi ruang Henri Lefebvre (Djonathan, 2026).

Masalah penelitian dirumuskan dalam pertanyaan: bagaimana politik produksi ruang pesisir dalam proses komersialisasi Kawasan Mawatu berdasarkan relasi antara pemerintah dan masyarakat dalam perspektif Teori Produksi Ruang Henri Lefebvre? Tujuan penelitian adalah menganalisis bentuk politik produksi ruang pesisir dalam proses komersialisasi Kawasan Mawatu melalui peran pemerintah, respons masyarakat, dan tiga dimensi produksi ruang Lefebvre.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman terhadap pengalaman, makna sosial, dinamika kekuasaan, dan perubahan pemanfaatan ruang pesisir. Objek penelitian adalah politik produksi ruang pesisir dalam proses komersialisasi Kawasan Mawatu. Fokus analisis meliputi peran pemerintah dalam penataan ruang, keterlibatan pengembang, respons masyarakat, serta perubahan fungsi dan akses ruang pesisir.

Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap sembilan informan yang berasal dari unsur pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat pesisir, tokoh adat, pelaku UMKM, dan lembaga negara. Data dokumentasi digunakan untuk melengkapi informasi mengenai kebijakan tata ruang, pembangunan kawasan, serta konteks perubahan ruang. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analisis menggunakan tiga dimensi Henri Lefebvre: praktik spasial, representasi ruang, dan ruang representasional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi Ruang Pesisir Dan Pergeseran Nilai Guna

Sebelum Pengembangan Kawasan Mawatu, Pantai Sala Hana Dimanfaatkan Masyarakat Sebagai Tempat Menangkap Ikan, Lokasi Bersandar Perahu, Tempat Rekreasi, Serta Ruang Interaksi Sosial. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Pembangunan Kawasan Wisata Mengubah Pola Pemanfaatan Tersebut. Kawasan Kemudian Dikembangkan Dengan Berbagai Fasilitas Pariwisata Dan Aktivitas Komersial. Perubahan Ini Memperlihatkan Pergeseran Fungsi Ruang Dari Ruang Hidup Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari-Hari Masyarakat Menuju Ruang Yang Semakin Diarahkan Pada Konsumsi, Rekreasi, Dan Investasi.

Perubahan tersebut juga dirasakan oleh nelayan. Dalam temuan penelitian, masyarakat menyampaikan bahwa sebelum pembangunan, kawasan pesisir merupakan lokasi penting untuk memperoleh ikan dan hasil laut. Setelah perubahan fungsi ruang, aktivitas nelayan dan akses terhadap ruang tangkap mengalami perubahan. Pelaku UMKM juga menghadapi keterbatasan dalam memanfaatkan ruang ekonomi ketika kawasan semakin didominasi aktivitas yang membutuhkan modal. Dengan demikian, perubahan ruang tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi menghasilkan perubahan terhadap praktik ekonomi dan sosial masyarakat.

Temuan ini sesuai dengan konsep praktik spasial Lefebvre yang menekankan bagaimana ruang digunakan dan diproduksi melalui aktivitas sehari-hari. Dalam kasus Mawatu, perubahan praktik spasial menunjukkan bahwa ruang yang sebelumnya terutama memiliki nilai guna bagi masyarakat semakin ditempatkan dalam logika nilai tukar. Komersialisasi dengan demikian tidak hanya berarti munculnya bangunan dan fasilitas wisata, tetapi juga perubahan hubungan masyarakat dengan ruang yang sebelumnya menjadi bagian dari kehidupan mereka.

Relasi Pemerintah, Masyarakat, Dan Pengembang

Relasi antarpelaku dalam pemanfaatan ruang pesisir menunjukkan posisi yang tidak sepenuhnya seimbang. Pemerintah memiliki kewenangan formal melalui perencanaan, kebijakan, perizinan, dan penataan ruang. Pihak pengembang mempunyai kekuatan ekonomi dan modal untuk merealisasikan kawasan wisata. Sementara itu, masyarakat memiliki pengalaman historis dan sosial terhadap ruang, tetapi ruang mereka untuk menentukan arah perubahan kawasan relatif lebih terbatas.

Dari sisi pemerintah, Mawatu diposisikan sebagai bagian dari pengembangan pariwisata Labuan Bajo dan diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru. Dokumen dan kebijakan tata ruang menjadi instrumen penting dalam menentukan fungsi kawasan. Di sisi masyarakat, terdapat respons yang beragam. Sebagian melihat pembangunan sebagai peluang ekonomi dan lapangan kerja, sedangkan sebagian lainnya menyoroti berkurangnya ruang aktivitas nelayan, terbatasnya akses ekonomi, serta kekhawatiran terhadap perubahan lingkungan pesisir.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa relasi pemerintah dan masyarakat tidak hanya berupa hubungan administratif, tetapi juga merupakan arena negosiasi mengenai fungsi ruang. Temuan penelitian memperlihatkan adanya dukungan, penyesuaian, dan kritik. Dalam perspektif politik ruang, kemampuan untuk menentukan fungsi dan arah pemanfaatan ruang merupakan bentuk kekuasaan. Karena itu, proses pembangunan Mawatu memperlihatkan adanya relasi kuasa yang memengaruhi siapa yang lebih kuat dalam menentukan bentuk ruang yang dihasilkan.

Representasi Ruang: Kebijakan Dan Legitimasi Komersialisasi

Dalam dimensi representations of space, pemerintah memproduksi ruang melalui dokumen perencanaan dan regulasi. Penelitian menunjukkan bahwa RTRW, RDTR, dan KKPR menjadi instrumen penting yang membingkai kawasan pesisir sebagai bagian dari pengembangan pariwisata dan investasi. Kawasan Batu Cermin ditempatkan dalam kerangka pengembangan perkotaan Labuan Bajo yang mencakup fungsi pariwisata, perdagangan, jasa, dan fasilitas pendukung.

Representasi ruang tersebut memiliki kekuatan karena menjadi dasar formal bagi pengaturan penggunaan ruang. Melalui bahasa perencanaan, ruang dipahami sebagai kawasan strategis yang mempunyai potensi ekonomi dan perlu dikembangkan. Pada saat yang sama, masyarakat dan tokoh adat mempunyai pemahaman yang dibentuk oleh pengalaman historis terhadap Pantai Sala Hana. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ruang tidak direpresentasikan secara tunggal.

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan kewenangan dan interpretasi regulasi antara rezim tata ruang kabupaten dan pengelolaan ruang laut provinsi. Dalam sumber penelitian disebutkan adanya pemberitaan mengenai temuan inspeksi terkait pembangunan tanggul dan reklamasi yang diduga berada di luar izin pemanfaatan ruang laut. Temuan tersebut belum merupakan keputusan hukum berkekuatan tetap, sehingga ditempatkan sebagai bagian dari dinamika dan kontestasi regulasi, bukan sebagai kesimpulan pelanggaran hukum.

Ruang Representasional: Kontestasi Makna Ruang Hidup Dan Logika Pasar

Dimensi representational space memperlihatkan bagaimana ruang dialami dan dimaknai oleh masyarakat. Bagi nelayan, tokoh adat, dan sebagian pelaku ekonomi lokal, Pantai Sala Hana tetap memiliki makna sebagai ruang hidup yang berkaitan dengan pekerjaan, interaksi sosial, budaya, dan sejarah. Perubahan nama menjadi Mawatu dan perubahan fungsi kawasan dipandang sebagai bagian dari transformasi identitas ruang.

Namun, tidak semua masyarakat menolak kehadiran kawasan. Kepala Desa Batu Cermin dalam penelitian menyampaikan dukungan terhadap proyek dan menjelaskan bahwa telah

dilakukan sosialisasi serta terdapat akses publik menuju pantai. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa respons masyarakat tidak bersifat tunggal. Ada kelompok yang melihat peluang ekonomi dan pembangunan, sementara kelompok lain lebih menekankan kehilangan akses, perubahan aktivitas, dan keterbatasan partisipasi.

Kontestasi tersebut dapat dibaca melalui konsep lived space dan abstract space. Ruang yang dialami masyarakat sebagai ruang hidup berhadapan dengan ruang yang dirancang melalui kebijakan dan logika investasi. Ketegangan antara keduanya menunjukkan bahwa perubahan ruang juga merupakan perubahan makna. Masyarakat mungkin masih dapat mengakses ruang secara fisik, tetapi posisi mereka dalam mengontrol dan menentukan fungsi ruang tidak lagi sama seperti sebelumnya.

Relasi Kuasa Dan Produksi Ruang Asimetris

Keseluruhan Temuan Memperlihatkan Produksi Ruang Yang Bersifat Asimetris. Pemerintah Mempunyai Kewenangan Regulatif, Pengembang Memiliki Kekuatan Modal, Sedangkan Masyarakat Lebih Banyak Berada Pada Posisi Menyesuaikan Diri Terhadap Ruang Yang Telah Direncanakan Dan Dikembangkan. Asimetri tersebut Terlihat Dari Keterbatasan Masyarakat Dalam Memengaruhi Proses Perencanaan Dan Pengambilan Keputusan Dibandingkan Kemampuan Negara Dan Pengembang Dalam Menentukan Arah Kawasan.

Dalam perspektif Lefebvre, kondisi tersebut menegaskan bahwa ruang merupakan produk sosial yang selalu terkait dengan kekuasaan. Perubahan fungsi Pantai Sala Hana menjadi Kawasan Mawatu tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pembangunan, investasi, praktik ekonomi, dan pengalaman masyarakat. Produksi ruang berlangsung melalui proses yang sekaligus menghasilkan perubahan fungsi, akses, dan makna ruang.

Temuan ini memperlihatkan bahwa komersialisasi kawasan pesisir memiliki dua sisi. Di satu sisi, pembangunan membuka peluang pariwisata, aktivitas ekonomi, dan lapangan kerja. Di sisi lain, manfaat dan kemampuan mengakses ruang tidak selalu terdistribusi secara merata. Karena itu, pembangunan ruang pesisir perlu mempertimbangkan partisipasi masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan keberadaan ruang hidup masyarakat sebagai bagian dari proses produksi ruang.

4. KESIMPULAN

Politik Produksi Ruang Pesisir Dalam Komersialisasi Kawasan Mawatu Merupakan Proses Sosial-Politik Yang Melibatkan Pemerintah, Pengembang, Dan Masyarakat Dengan Posisi Kekuasaan Yang Tidak Sepenuhnya Seimbang. Pertama, Pada Dimensi Praktik Spasial Terjadi Perubahan Pemanfaatan Pantai Sala Hana Dari Ruang Yang Digunakan Untuk Aktivitas

Nelayan, Ekonomi, Rekreasi, Dan Interaksi Sosial Menuju Ruang Yang Semakin Berorientasi Pada Pariwisata Dan Investasi. Perubahan Tersebut Menunjukkan Pergeseran Nilai Guna Menuju Nilai Tukar. Kedua, Pada Dimensi Representasi Ruang, Kebijakan Tata Ruang Dan Agenda Pembangunan Pariwisata Menjadi Instrumen Penting Dalam Membentuk Serta Melegitimasi Fungsi Kawasan Sebagai Ruang Wisata. Ketiga, Pada Dimensi Ruang Representasional, Masyarakat Tetap Memaknai Pesisir Sebagai Ruang Hidup Yang Memiliki Nilai Sosial, Budaya, Ekonomi, Dan Historis, Meskipun Makna Tersebut Berhadapan Dengan Logika Pasar Dan Investasi. Dengan Demikian, Perubahan Mawatu Bukan Sekadar Perubahan Fisik, Melainkan Proses Produksi Ruang Yang Membentuk Kembali Akses, Fungsi, Relasi Kuasa, Dan Makna Ruang Pesisir.

Saran penelitian ini adalah agar pemerintah memperkuat pelibatan masyarakat dalam perencanaan ruang pesisir, pengelola dan investor membuka ruang ekonomi yang lebih adil bagi masyarakat dan UMKM lokal serta menjaga lingkungan, sedangkan masyarakat perlu terus berpartisipasi dalam pengawasan dan penyampaian aspirasi. Penelitian lanjutan dapat membandingkan Mawatu dengan kawasan pesisir lain untuk melihat variasi politik produksi ruang.

DAFTAR PUSTAKA

- Calrinto Mami, A., & Mahagangga, I. G. A. O. (2020). Respon masyarakat Desa Batu Cermin dalam pengembangan daya tarik wisata Gua Batu Cermin, Labuan Bajo. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 8(1), 62. <https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2020.v08.i01.p08>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Djonathan, M. T. (2026). Implementasi program KURDA SAYANG dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo. *Public Service and Governance Journal*, 7(2), 42–50. <https://doi.org/10.56444/psgj.v7i2.3814>
- Ibrahim, I., Anwar, A., & Khaerah, N. (2023). Fungsi sosial ruang publik tepi laut Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(3), 1412–1419. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i3.965>
- Kamim, A. B. M. (2022). Ocean grabbing di Indonesia dan Malaysia: Catatan krisis sosio-ekologis dampak proyek reklamasi. *Jurnal Aspirasi*, 13(2).
- Kiwang, A. S., & Arif, F. M. (2020). Perubahan sosial ekonomi masyarakat Labuan Bajo akibat pembangunan pariwisata. *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 5(2), 87–97. <https://doi.org/10.25273/gulawentah.v5i2.7290>
- Lefebvre, H. (1991). *The production of space*. Blackwell Publishing.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

- Nuraini, D., et al. (2025). Perubahan makna ruang publik di kawasan wisata Kota Lama Surabaya. *Altasia: Jurnal Pariwisata Indonesia*, 7(2), 369–374. <https://doi.org/10.37253/altasia.v7i2.10449>
- Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. (2024). *Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Labuan Bajo*.
- Sanjiwani, P. K. (2023). Privatisasi sempadan pantai oleh penyedia akomodasi pariwisata di Sanur, Denpasar. *Jurnal Analisis Pariwisata*.
- Sari, D. J., Sintia, L., Kurniawan, R., Satmaidi, E., & Wulandari. (2025). Permasalahan penataan ruang di pesisir Pantai Panjang: Antara perlindungan lingkungan untuk wisata alam berkelanjutan dan dorongan pariwisata.
- Sujadmi, & Murtasidin, B. (2020). Perencanaan tata ruang laut: Konflik, negosiasi, dan kontestasi kepentingan ekonomi politik lokal di Bangka Belitung. <https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8514>
- Waskito, A. P., Wulandari, A., & Nursanty, E. (2025). Membangun identitas metropolitan: Analisis penerapan Transit Oriented Development dan city branding di Jakarta. *SARGA: Journal of Architecture and Urbanism*, 19(1), 56–74. <https://doi.org/10.56444/sarga.v19i1.1807>
- Widiana, K., Winarko, S. P., & Kurniawan, A. (2026). Pengaruh DPK, NPL, dan CAR terhadap penyaluran kredit pada bank umum yang terdaftar di BEI periode 2022–2025. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(3). <https://doi.org/10.58192/profit.v5i3.5031>